PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I GUSTI LANANG AGUNG PARWATA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **848273**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.360.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/21 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 382.400.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.250.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.150.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SXR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOBIL, KIA JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	261.998.213
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.004.398.213
III.	HUTANG	Rp.	394.267.098
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.610.131.115

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.